

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

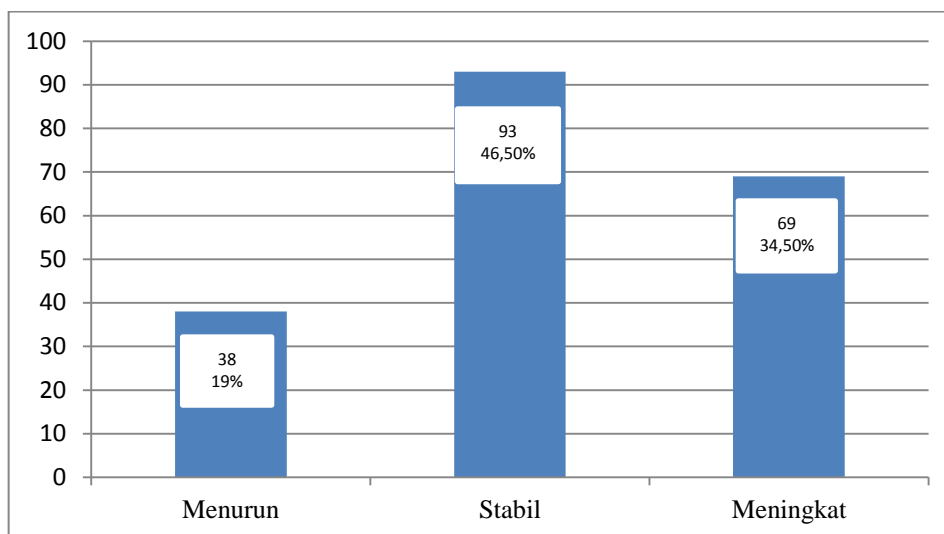
### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia termasuk negara yang memiliki kepadatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tertinggi di Dunia melalui kegiatan survey pada 132 negara yang telah dilaksanakan oleh *International Financial Corporation* (IFC) (IFC 2016). Bagi negara Indonesia, UMKM menjadi panutan utama perekonomian. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran vital dan fundamental dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa UMKM sangat mendominasi dalam sektor perekonomian Indonesia dengan jumlah lebih dari 99%. Pentingnya sektor UMKM diakui karena berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), di mana PDB yang tinggi menginduksi pertumbuhan ekonomi (Lutfi et al., 2022). Selain itu, UMKM berkontribusi mengurangi tingkat pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja, serta pemerataan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB pada tahun 2019 mencapai 60,51% dari keseluruhan PDB nasional (kemenkop UKM, 2019). Sementara itu, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,4 Juta, dengan jumlah tenaga kerja 96,92% atau 123,3 juta jiwa.

Banyaknya UMKM di Indonesia berbanding lurus dengan sebaran lapangan kerja sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah

menjadikan masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Ada tiga tantangan yang muncul dari pandemi covid-19 bagi UMKM yaitu; tantangan terkait biaya dan keuangan, terganggunya kegiatan, dan tantangan eksistensi (Zutshi et al., 2021). Hampir seluruh sektor perekonomian di Indonesia merasakan efek domino pandemi Covid-19. Aktivitas UMKM terganggu akibat berbagai kebijakan pemerintah guna menekan penyebaran virus. Dampaknya, UMKM mengalami masalah ketersediaan bahan baku, permintaan pasar yang hampir tidak ada, dan proses distribusi (Bahtiar & Saragih, 2020). Hal ini juga berimplikasi pada perlambatan aktivitas perekonomian Indonesia mengingat 99% pelaku usaha merupakan sektor UMKM.

*Sustainability* Usaha Kecil Menengah adalah kemampuan UKM untuk menjaga kelangsungan usahanya. Menurut (Eresia-Eke & Raath, 2013), UKM yang memiliki keberlangsungan usaha adalah UKM yang mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tiga hal yang dapat diukur untuk menemukan keberlanjutan UKM adalah kemampuan *finansial*, kemampuan strategis, dan organisasi kemampuan. Salah satu cara untuk meningkatkan keberlanjutan kemampuan *finansial* adalah melalui inklusi keuangan (Le et al., 2019). Dalam perspektif perekonomian, keberadaan keuangan inklusi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan, dan jika dikembangkan dengan optimal maka dapat membawa kondisi ekonomi ke level pertumbuhan yang berkualitas (Sutanto, 2020).



**Gambar 1.1 Grafik *Sustainability* UMKM di Kota Lhokseumawe**  
Sumber. Wawancara UMKM

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa dari 200 UMKM di kota Lhokseumawe pada Tahun 2022 Mengalami keberlanjutan keuangan dengan Stabil. Dengan rincian UMKM yang keberlanjutan keuangan Menurun Sebesar 38 (19%), UMKM yang keberlanjutan keuangan Stabil Sebesar 93 (46,50%), UMKM yang keberlanjutan keuangan Meningkat Sebesar 69 (34,50%).

Berkaitan dengan fenomena *Sustainable Finance MSES Sector*, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dan termasuk ke dalam Digital Financial Inclusion seperti yang dibahas pada penelitian (Lutf et all, 2021) terkait dengan keberlanjutan inklusi keuangan digital dalam konteks yordania, hasil penelitian (Lutf et all, 2021) yang menunjukkan bahwa tiga faktor yang memberikan pengaruh terhadap *sustainable finance MSES sector* yakni salah satunya *digital financial inclusion* tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian penelitian yang dilakukan (Aduda, 2021) mengenai inklusi keuangan dan stabilitas sektor keuangan dengan referensi yang menyatakan bahwa studi ini

menyimpulkan bahwa tindakan intervensi inklusi keuangan harus dilanjutkan, serangkaian produk yang membentuk inklusi keuangan harus diidentifikasi dan disediakan. Langkah-langkah yang tepat dari inklusi keuangan yang mencakup akses dan penggunaan harus diterapkan, karena akses dan penggunaan tidak sama tetapi saling melengkapi.

Inklusi keuangan saat ini selalu menjadi bahasan penting pada taraf global maupun nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan, program keuangan inklusif dirasa perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inklusi keuangan dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal oleh seluruh pelaku ekonomi. Dalam inklusi keuangan tersedia berbagai jasa keuangan seperti tabungan, perkreditan, asuransi, dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh seluruh pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi yang memiliki pendapatan rendah (Okaro, 2020).

Inklusi keuangan adalah upaya dalam melakukan penghapusan segala bentuk hambatan yang ada terhadap akses layanan keuangan masyarakat dengan memanfaatkan lembaga keuangan formal atau perbankan. Tujuan inklusi keuangan yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Awanti, 2021).

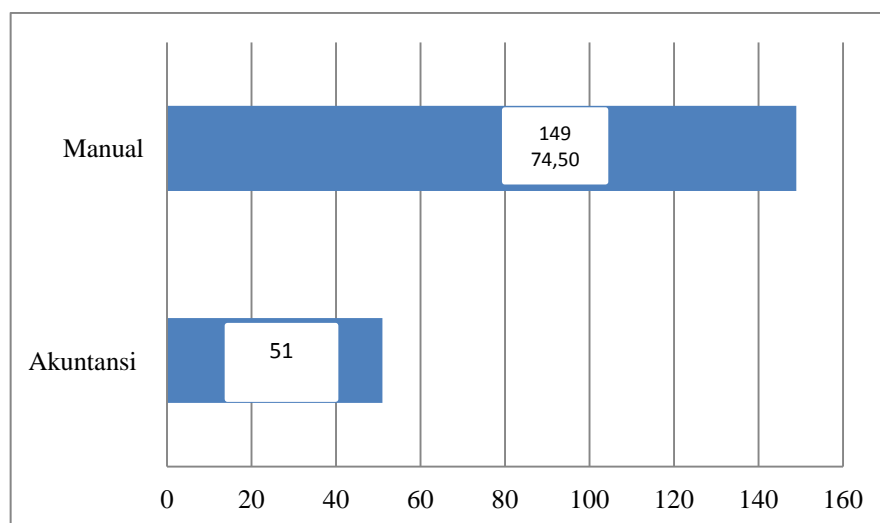
Menurut Anwar & Amri (2021), inklusi keuangan adalah sebuah proses untuk menjamin akses terhadap produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh setiap bagian masyarakat baik masyarakat umum ataupun masyarakat yang rentan

seperti masyarakat berpendapatan rendah pada tingkat harga yang mampu dibayar dengan cara yang adil dan transparan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah merupakan suatu kondisi di mana setiap orang dimungkinkan untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

Kendala itu setidaknya bersumber dari dua pihak. Pertama, sisi lembaga keuangan. Kekakuan penerapan prinsip prudentialitas cukup menyulitkan pemenuhan hak *access to credit*. Kemudian keterbatasan jaringan pelayanan, lemahnya SDM untuk account officer misalnya, dan faktor biaya yang tidak murah. Kedua, sisi pelaku usaha, terutama di level usaha mikro dan kecil, terkendala lemahnya aset yang legal sebagai jaminan (*collateral*). Belum lagi soal pencatatan keuangan usaha yang rata-rata mereka tidak miliki karena minimnya pengetahuan, dan sederet masalah lainnya.

UMKM di Kota Lhokseumawe mengalami perkembangan yang cukup pesat dapat dilihat dari tahun 2018-2021. Dalam keberlanjutan dan pengembangan UMKM tidaklah mudah, pendapatan yang didapatkan UMKM yang cenderung tidak stabil banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar dikarenakan tidak dapat memproduksi lagi. Berdasarkan survei awal yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe, menunjukkan bahwa sebagian besar usaha mengalami penurunan pendapatan serta ada juga pelaku UMKM dengan perolehan pendapatan yang cukup stabil. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pemahaman akan pengelolaan keuangan pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe masih rendah. Selain itu pula di Kota Lhokseumawe

terlihat masih banyak pelaku UMKM yang tidak menggunakan informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM belum bisa menggunakan data akuntansi dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat oleh beberapa pelaku UMKM yang ada di Kota Lhokseumawe yang memberikan hasil yaitu sebagian besar hanya menggunakan pencatatan secara manual dan sederhana seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja bahkan ada juga pelaku usaha yang tidak melakukan pencatatan keuangan, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam melakukan pencatatan secara baik dan benar serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan laporan keuangan secara baik dan benar.



**Gambar 1.2 Grafik Informasi Akuntansi UMKM DI Kota Lhokseumawe**  
Sumber. Wawancara UMKM

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe masih menggunakan pencatatan secara manual, dari 200 pelaku UMKM yang menggunakan pencatatan manual 149 (74,50%) dan pencatatan Akuntansi 51 (25,50%). Oleh sebab itu mengapa sebuah peran akuntansi manajemen sangat penting diterapkan dalam menjalankan usaha walaupun usaha

yang dijalankan merupakan suatu usaha yang masih tergolong baru dalam dunia bisnis. Peran akuntansi manajemen yang diterapkan bukan hanya dilihat dari fungsi, ide atau berbagai strategi yang harus disiapkan melainkan juga produknya sendiri harus ditampilkan lebih menarik, strategi branding produk, harga yang relatif bersahabat oleh semua kalangan, pemilihan tempat yang strategis yang mudah dijangkau, dan juga pemilihan karyawan dalam bisnis UMKM.

Informasi keuangan UMKM yang sederhana yang dibuat oleh pelaku UMKM selama periode tertentu akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi bukan hal yang mudah. Hal ini yang membuat para pelaku UMKM banyak yang melupakan membuat laporan keuangan yang sesuai standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pembukuan bukan dikhususkan hanya digunakan oleh perusahaan yang telah besar namanya atau telah maju saja. Akan tetapi, pembukuan juga wajib digunakan oleh usahaberskala kecil dan menengah atau bisa disebut dengan UKM (Suhendar & Suhardi, 2019). Seiring berkembangnya usaha, maka system pembukuan dan akuntansi pun harus mengalami perkembangan. Terlebih pada saat jumlah transaksi pada usaha semakin meningkat dan akan menyulitkan jika dikerjakan secara manual, disinilah penerapan penggunaan teknologi sangat diperlukan, maka dari itu peran komputerisasi harus dilakukan dan diterapkan dalam akuntansi.

Untuk mendukung dan memperluas inklusi keuangan terdapat *platform* yang mengembangkan teknologi informasi yaitu *Banking model* (Makina, 2019). *Banking model* adalah bisnis berbasis teknologi yang bersaing atau berkolaborasi

dengan lembaga keuangan (Rusydia, 2019). Dalam definisi lain, (Lee & Teo, 2015) menyatakan bahwa *Banking model* mengacu pada layanan keuangan atau produk inovatif yang disampaikan oleh teknologi baru. Berdasarkan penelitian Hutabarat (2018), ditemukan bahwa produk teknologi informasi mempengaruhi inklusi keuangan pada masyarakat Jabodetabek. Studi lain oleh Fitriani, (2018) dan Sari & Dwilita (2018)) menunjukkan bahwa *Banking model* mampu meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, peningkatan inklusi keuangan melalui digitalisasi perbankan yang terintegrasi dengan *Banking model* ternyata berdampak positif dalam inklusi keuangan tersebut (Mittal et al., 2016).

Perbankan *Banking model* mengurangi biaya transaksi perbankan baik untuk UKM maupun bank. UKM tidak perlu mengunjungi bank untuk transaksi perbankan, menyediakan layanan sepanjang waktu (Cheng et al., 2006). UKM dapat mengajukan pinjaman dan melakukan layanan perbankan lainnya secara online (Smith and Rupp, 2003). Terlepas dari manfaat ini, penelitian kecil telah dilakukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi *Banking model* oleh UKM di negara berkembang. *Banking model* telah dibahas dari sudut pandang ritel (B2C) (Wan dan Chow, 2005; Celik, 2008), namun layanan keuangan untuk UKM sejauh ini mendapat perhatian yang terbatas. (Gehling et al., 2007). Meskipun demikian, layanan keuangan online merupakan isu penting bagi kelangsungan UKM (Wright dan Ralston, 2002). *Banking model* tumbuh lebih cepat daripada sektor *e-commerce* lainnya, karena layanan keuangan padat data dan tidak memerlukan pengiriman fisik (Zekos, 2004). Literatur tentang UKM di negara maju sebagian besar berfokus pada masalah *e-commerce* (Bunker dan



MacGregor, 2000), tidak seperti di negara berkembang, pembiayaan tampaknya tidak menjadi masalah kritis (Guglani, 2001).

Beberapa UMKM yang berada di Kota Lhokseumawe menggunakan Banking model yaitu UMKM Petro Dollar Coffe, UMKM Bara Coffe, UMKM Mahkota Sport, dan lainnya. UMKM Petro Dollar Coffe dan UMKM Bara Coffe menggunakan beberapa model transaksi salah satunya menggunakan M-Banking. Dengan adanya model transaksi itu pelanggan memudahkan bertransaksi. UMKM Petro dollar Coffe dan UMKM Bara Coffe juga mengalami peningkatan transaksi. Selanjutnya UMKM Mahkota Sport juga menggunakan banking model yaitu menggunakan model transaksi OVO, M-Bagking, Shoppy pay, dan lainnya. Dengan adanya bermacam model banking memudahkan pelanggan dalam bertransaksi tidak perlu menggunakan uang cas lagi. Pihak UMKM Mahkota Sport juga mendapatkan keberlangsungan usahanya.

Beberapa UMKM di kota Lhokseumawe mengalami kebangkrutan ataupun kalah dalam bersaing salah satunya warung kopi Ulee Kareng sudah tutup karena keterlambatan dalam menggunakan model banking, dan juga beberapa UMKM lainnya yang mengalami penerunan yang sangat drastis, yang tidak melakukan perubahan sistem informasi teknologi. Kota Lhokseumawe merupakan wilayah yang dengan jumlah UMKM yang cukup banyak. Tentunya saat ini pelaku usaha memiliki tantangan tersendiri agar bisa mempertahankan keberlanjutan usahanya dalam menghadapi krisis ekonomi yang ditambah lagi dengan banyaknya persaingan usaha (<https://kumparan.com/wafiq-amelia/dampak-negatif-covid-19-terhadap-umkm-1zO0rrVt9dM>).

Di era digital ini, teknologi berperan penting dalam mengembangkan UMKM agar mampu bersaing dengan produk lainnya. Nika Pranata pemenang *Call for Submission* IDF 2019 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan daya saing UMKM perlu dorongan *go digital* dan *go online* (Jawa Pos, 16 Januari 2020). *Banking model* dapat mengurangi informasi asimetris dan meningkatkan pasokan UMKM kredit perbankan (Sheng, 2020). *Banking model* mengacu pada penggunaan teknologi untuk menghasilkan solusi keuangan (Arner et al., 2016) dan dapat mengurangi hambatan pendanaan terhadap UKM (Makina, 2019). Kemudahan yang ditawarkan *Banking model* berpengaruh dalam mewujudkan harapan Indonesia sebagai negara digital terluas di tahun 2014 (Muzdalifa et al., 2018c). Peran teknologi keuangan untuk memperkuat inklusi keuangan dan pertumbuhan UKM di Indonesia membuat akses pendanaan lebih mudah terutama untuk UKM non-bankable (Shofawati, 2019). Sehingga diperlukan kerjasama antara UMKM dan lembaga keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan (Fitriani, 2018), sedangkan untuk mendukung keberlangsungan UKM diperlukan penggunaan *Banking model* dan peningkatan *Sustainable Finance SMEs* masyarakat. Oleh karena itu, perlu diketahui hubungan antara *Banking model*, inklusi keuangan, dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan UKM di Kota Lhokseumawe. Penelitian Frank (2020) menyimpulkan bahwa penggunaan layanan model banking secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan UKM di Kamerun. Hal ini sejalan dengan temuan Ammar & Ahmed (2016) yang menulis tentang dampak model banking di Sudan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dengan adanya regulasi model banking dapat membuka jalan bagi

layanan model banking. Digitalisasi layanan perbankan telah banyak membantu memfasilitasi kegiatan UKM di Kamerun dan mengatasi kesulitan keterlambatan dalam melakukan transaksi bisnis. Namun, UKM lambat dalam mengadopsi layanan *Banking model*. Agar Bank dapat secara efektif mengintegrasikan segmen UKM dengan sistem *Banking model*, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang bertanggung jawab atas hal ini.

Melihat landasan teori dari banyak penelitian terdahulu terdapat beberapa Kontroversi yang menempatkan variabel *Digital Financial Inclusion* sebagai variabel Independent yang memberikan pengaruh terhadap *Sustainable Finance SMEs Sector* yaitu pada penelitian (Lutf et all, 2021), dan penelitian (Aduda, 2012). Kemudian terdapat juga penelitian yang menempatkan *Financial Institution* sebagai variabel moderating untuk mempengaruhi hubungan variabel independen lain terhadap *Sustainable Finance SMEs Sector* oleh (Davis, 1989) membahas tentang *Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan metode kuantitatif dengan studi moderasi *Banking Model* dengan *Digital Financial Inclusion* terhadap *Sustainable Finance* Sektor UMKM dan untuk merancang model Inklusi keuangan digital dan strategi keberlanjutan keuangan sektor UMKM di Kota Lhokseumawe yang dengan judul "Dampak *Digital Financial Inclusion* terhadap *Sustainable Finance* Sektor UMKM Wilayah Kota Lhokseumawe dengan Moderasi Layanan *Banking Model*".

## 1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *Perceived Usefulness* terhadap *Sustainable Finance SMEs*?
2. Bagaimana dampak *Perceived Financial Cost* terhadap *Sustainable Finance SMEs*?
3. Bagaimana dampak *Perceived Ease of Use* terhadap *Sustainable Finance SMEs*?
4. Bagaimana dampak *Banking Model* terhadap *Sustainable Finance SMEs*?
5. Bagaimana *Banking Model* memperkuat/memperlemah Dampak *Perceived Usefulness* terhadap *Sustainable Finance SMEs*?
6. Bagaimana *Banking Model* memperkuat/memperlemah Dampak *Perceived Financial Cost* terhadap *Sustainable Finance SMEs*?
7. Bagaimana *Banking Model* memperkuat/memperlemah Dampak *Perceived Ease of Use* terhadap *Sustainable Finance SMEs*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak *Perceived Usefulness* terhadap *Sustainable Finance SMEs*.

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak *Perceived Financial Cost* terhadap *Sustainable Finance SMEs*.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak *Perceived Ease of Use* terhadap *Sustainable Finance SMEs*.
4. Untuk mengetahui bagaimana dampak *Banking Model* terhadap *Sustainable Finance SMEs*.
5. Untuk mengetahui bagaimana *Banking Model* memperkuat/memperlemah Dampak *Perceived Usefulness* terhadap *Sustainable Finance SMEs*.
6. Untuk mengetahui bagaimana *Banking Model* memperkuat/memperlemah Dampak *Perceived Financial Cost* terhadap *Sustainable Finance SMEs*.
7. Untuk mengetahui bagaimana *Banking Model* memperkuat/memperlemah Dampak *Perceived Ease of Use* terhadap *Sustainable Finance SMEs*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat secara praktis maupun secara akademisi, yaitu :

##### **1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Praktis**

###### **1.4.1.1 Pelaku Usaha Sektor UMKM di Indonesia**

Hasil studi ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan pelayanan bisnis sektor usaha UMKM dengan memberikan pengetahuan tentang sistem regulasi dan pelayanan *digital financial inclusion* yang dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sektor UMKM di Kota Lhokseumawe.

#### **1.4.1.2 Pemerintah (*Regulator*)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah terkait sistem regulasi yang mengakomodir semua kepentingan baik dari pihak pelaku usaha maupun penyedia layanan keuangan dan financial Institution sehingga dapat dinyatakan legal dan berlaku secara umum bagi para pelaku usaha UMKM sebagai upaya peningkatan perekonomian negara melalui penguatan sektor usaha mikro di Kota Lhokseumawe.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Akademisi**

##### **1.4.2.1 Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademisi dan peneliti selanjutnya, sehingga dapat memperkaya kajian teoritis tentang sektor bisnis UMKM yang optimal dalam menggerakkan perekonomian rakyat dan dapat membantu pengembangan ilmu manajemen keuangan usaha mikro pada masa yang akan datang.

##### **1.4.2.2 Pengembangan Teori dalam Ilmu manajemen keuangan dan UMKM**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori *financial development* dengan menambahkan model pelayanan digital dalam pelayanan dan keberlanjutan sektor usaha UMKM di Kota Lhokseumawe.